ISSN: 2615-2118 (print), 2715-8020 (online)

Sosialisasi Dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Pendataan Dan Pengendalian Penduduk Permanen-Nonpermanen Berbasis Kampung

Zaidir[1*], Erizal[2], Bagus Subekti Nuswantoro[3]

[1]Prodi D3 Teknologi Informasi, [2]Prodi S1 Sistem Informasi, [3]Prodi S1 Hubungan Internasional
Universitas Respati Yogyakarta
[1]zaidirtan@respati.ac.id

ABSTRAK

Penduduk suatu wilayah jika dilihat dari aspek asal usul dan administratif terdiri atas penduduk permanen dan penduduk nonpermanen. Masalah penduduk nonpermanen misalnya keluar masuk wilayah RT, pindah, dan masalah sosial. Pengurus RT-RW kesulitan melakukan koordinasi atau pelaporan ke pihak terkait karena tidak ada data yang akurat. Para anak kost belum terdata dengan baik bahkan sulit untuk mengendalikan mereka terutama untuk hal yang berdampak mengganggu karena banyak pemilik kost yang tidak berada di tempat kost. Permasalahan penduduk permanen yang utama adalah penerima bantuan, kesehatan, dan status keberadaan dari penduduk tersebut (dalam/luar wilayah) yang bertahun-tahun tidak terselesaikan. Penduduk yang bersangkutan tidak mau mencabut KTP untuk pindah ke tempat tinggal yang baru, sementara penduduk tersebut juga tidak mau berkontribusi di wilayah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melakukan pendekatan dengan sosialisasi dan pendampingan mengenai cara mengatasi persoalan terkait kependudukan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya peningkatan kemampuan pengurus RT-RW untuk melakukan pendataan dan pengendalian penduduk permanen-nonpermanen. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dapat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan pada bidang teknologi informasi untuk mendukung pengurus RT-RW dalam peningkatan ketersediaan informasi terkait penduduk permanen-nonpermanen.

Kata kunci : *Sistem Informasi; Penduduk Permanen; Penduduk Nonpermanen*

ABSTRACT

The population of an area when viewed from the origin and administrative aspects consists of permanent residents and non-permanent residents. Problems with non-permanent residents, for example moving in and out of the RT area, moving, and social problems. RT-RW administrators have difficulty coordinating or reporting to related parties because there is no accurate data. The boarding house children have not been properly recorded and it is even difficult to control them, especially for things that have a disturbing impact because many boarding owners are not at the boarding house. The main problems of permanent residents are beneficiaries, health, and status of existence of these residents (inside/outside the area) which have not been resolved for years. The residents concerned do not want to revoke their KTP to move to a new place of residence, while these residents also do not want to contribute to the area. This community service activity aims to take an approach with socialization and assistance on how to solve problems related to population by utilizing information technology as an effort to increase the ability of RT-RW administrators to collect data and control permanent-non-permanent residents. The results of community service activities are that they can contribute to knowledge in the field of information technology to support RT-RW administrators in increasing the availability of information regarding permanent and non-permanent residents.

Keywords*: Information Systems; Permanent Residents; Non-permanent Residents*

1. PENDAHULUAN

Aspek administratif dan aspek sosial yang melekat pada urusan penduduk menjadikan masalah ini merupakan hal yang kompleks. Kelurahan adalah ujung tombak pelaksana pendafataran penduduk sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah sebagai pemegang amanat pengelolaan data kependudukan. Beragam informasi dapat dihasilkan apabila pengelolaan data dikerjakan secara tepat dan cermat (Choirunnisa, Nugraha, & Qoroni, 2022). Informasi terkait aspek administrasi dari penduduk menjadikan pengolahan data kependudukan sangat diperlukan. Proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan umum dan pembangunan bidang lain merupakan rentetan aktivitas untuk penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan (Aziz & Fajarita, 2018).

Penduduk Indonesia sangat banyak dan menyebar pada banyak wilayah, baik desa maupun kota. Admnistrasi kependudukan semakin menjadi hal yang pokok atau utama karena sangat erat kaitannya dengan aktivitas sosial terutama pada saat jumlah penduduk yang semakin banyak (Dewantari & Kurniawan, 2021). Ada dua kategori penyebutan terhadap penduduk yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk yang menetap pada suatu daerah yang bukan merupakan penduduk asli dari daerah itu disebut dengan penduduk pendatang. Contohnya adalah penduduk pendatang dari daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain yang tinggal di Yogyakarta (Sudibya, Pradnya, Suardika, & Kusuma, 2019). Penduduk pendatang sering disebut penduduk nonpermanen. Pergerakan atau mobilisasi penduduk nonpermanen ini memiliki makna penduduk yang menuju ke suatu daerah lainnya, tapi sejak awal sudah merencanakan sementara waktu saja. Pergerakan penduduk nonpermanen banyak ditemukan pada wilayah desa ke desa lainnya, wilayah desa menuju kota atau wilayah kota ke kota yang lain (Redfada & Nurharjadmo, 2021). Penduduk yang menetap pada suatu daerah yang merupakan penduduk asli dari daerah itu disebut dengan penduduk permanen (Zaidir, 2022).

Kampung Kepuh Balapan yang merupakan daerah perkotaan di Yogyakarta juga memiliki masalah kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus. Masalah penduduk nonpermanen di tiap Rukun Tetangga (RT) seperti keluar masuk wilayah RT, pindah tempat kost, dan kasus sosial lainnya. Pemangku kepentingan pada tiap RT ataupun RW terkendala dalam hal koordinasi maupun pelaporan ke pihak terkait karena tidak ada data yang akurat. Penduduk nonpermann belum terdata dengan baik bahkan sulit untuk mengendalikannya khususnya terkait hal yang berakibat kurang baik bagi kampung. Penduduk pendatang tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia saja, namun ada juga yang berasal dari negara lain. Banyak pemilik kost yang tidak di tempat, menjadi faktor pendukung munculna masalah penduduk pendatang. Penduduk permanen memiliki masalah terkait status keberadaan dari penduduk (dalam wilayah atau luar wilayah). Penduduk permanen yang tinggal dalam wilayah lebih mudah dalam pengendaliannya, namun penduduk permanen yang tinggal di luar wilayah memiliki masalah tersendiri. Penduduk yang tinggal di luar wilayah kurang berkontribusi di wilayah, datang hanya apabila membutuhkan urusan administrasi saja. Apabila ada tagihan pihak ketiga seperti kredit atau pajak menyulitkan pengurus RT-RW. Masalah penduduk permanen lainnya terkait bantuan sosial, karena basis data di tingkat RT-RW tidak tersedia yang berbasis komputer, sering terjadi tumpang tindih dan sulit dipatau bahkan sulit untuk dimonitor dan evaluasi secara khusus di wilayah terkait.

Berdasarkan uraian masalah di atas dibutuhkan suatu sistem pengolahan data dengan komputer memanfaatkan basis data (database) sebagai tepat penyimpanan data yang lebih praktis dengan ukuran pengarsipan tidak besar, proses pencarian data lebih mudah dengan waktu yang singkat dalam menemukan data (Andika, 2021). Dengan adanya format penyimpanan data dalam database, memudahkan pengendalian kerangkapan data yang menjadi salah satu

keuntungannya (Musa, Seto, Sa'o, & Naja, 2022). Peningkatkan efisiensi dalam pengolahan data kepedudukan pemerintah daerah khususnya di tingkat desa sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data sebagai dampak positif komputerisasi (Henny, 2020). Sistem komputer yang dihasilkan selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan agar pengurus kampung sampai pengurus RT tidak kesulitan lagi melakukan identifikasi dan pengendalian penduduk permanen-nonpermanen. Dengan sosialisasi dan pelatihan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kampung. Teknologi data hanyalah alat (tools) yang tidak akan menghasilkan perubahan apapu apabila tidak didukung oleh kualitas SDM dengan budaya kerja yang memadai untuk memanfaatkan alat tersebut. Hal ini wajib disadari dan harus menjadi perhatian utama (Gunawan & Martua, 2021). Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka berbagai persoalan terkait penduduk permanen-nonpermanen dan kemampuan pengurus RT-RW terhadap teknologi tidak akan pernah terselesaikan.

2. PERMASALAHAN MITRA

Kampung Kepuh-Balapan merupakan bagian dari wilayah kelurahan Klitren kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta. Kelurahan Klitren memiliki 3 kampung yaitu kampung Klitren Lor, kampung Iromejan, dan kampung Kepuh-Balapan. Kampung Kepuh-Balapan terdiri atas 6 RW yaitu RW 11, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, dan RW 16. Kampung Kepuh-Balapan terletak di tengah kota yang cukup padat, terdapat beberapa kampus seperti IST "AKPRIND", Politeknik YKPN, dan Politeknik LPP, yang memicu banyaknya tempat-tempat kos bagi warga pendatang. Selain kampus juga banyak terdapat hotel-hotel dan usaha-usaha UMKM.

Gambar 1 Denah kampung Kepuh-Balapan

Batas-batas wilayah kampung Kepuh-Balapan:
Utara : Desa Caturtunggal
Selatan : Kelurahan Demangan dan Kelurahan Baciro
Barat : Kampung Iromejan dan kampung Klitren Lor
Timur : Jl. Iromejan dan Demangan

Kampung Kepuh-Balapan jika dilihat dari wilayah administratif dan jumlah Rukun Warga (RW) cukup luas dan cukup banyak. Kampung Kepuh-Balapan sebelah Utara terdiri atas 3 RW yaitu RW 11, RW 12, dan RW 13. Kampung Kepuh-Balapan sebelah Selatan terdiri atas 3 RW yaitu RW 14, RW 15, dan RW 16.

RW 11 terdiri atas 6 RT yaitu RT 40 sampai RT 45. RW 12 terdiri atas 3 RT yaitu RT 46 sampai RT 48. RW 13 terdiri atas 4 RT yaitu RT 49 sampai RT 52. RW 14 terdiri atas 4 RT yaitu RT 53 sampai RT 56. RW 13 terdiri atas 3 RT yaitu RT 57 sampai RT 59. RW 16 terdiri

atas 3 RT yaitu RT 60 sampai RT 62. Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 72 tahun 2018 maka kedua kampung ini digabung dengan nama kampung Kepuh-Balapan (disingkat KeBal).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di kampung Kepuh-Balapan terkait kondisi existing dari penduduknya berjumlah lebih kurang 3,750 orang yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk permanen (asli wilayah) dan penduduk nonpermanen (pendatang). Penduduk permanen berdasarkan status keberadaannya juga dibagi menjadi dua yaitu berdomisili di dalam wilayah dan berdomisili di luar wilayah. Secara lengkap mengenai penduduk kampung Kepuh-Balapan lebih kurang seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Profil penduduk Kampung Kepuh-Balapan

No	**RW**	**RT**	**Jumlah Penduduk Permanen**			**Jml Penduduk Nonpermanen**	**Jumlah Total**
			Domisili Dalam	**Domisili Luar**	**Jumlah**		
1	RW 11	RT 40	186	23	209	41	250
		RT 41	139	47	186	59	245
		RT 42	64	55	119	138	257
		RT 43	85	69	154	25	179
		RT 44	89	66	155	154	309
		RT 45	69	62	131	27	158
2	RW 12	RT 46	47	19	66	52	118
		RT 47	53	57	110	61	171
		RT 48	55	35	90	51	141
3	RW 13	RT 49	159	12	171	106	277
		RT 50	91	14	105	66	171
		RT 51	89	15	104	29	133
		RT 52	40	24	64	31	95
4	RW 14	RT 53	92	17	109	42	151
		RT 54	40	20	60	20	80
		RT 55	72	13	85	55	140
		RT 56	93	28	121	25	146
5	RW 15	RT 57	74	105	179	36	215
		RT 58	78	58	136	70	206
		RT 59	42	93	135	43	178
6	RW 16	RT 60	70	46	116	65	181
		RT 61	40	17	57	11	68
		RT 62	71	22	93	29	122
Jumlah Total			**1.838**	**917**	**2.755**	**1.236**	**3,991**

Posisi pengurus kampung menjadi sangat penting semenjak terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) nomor 72 tahun 2018 tertanggal 7 November 2018 tentang pembentukan pengurus kampung. Dengan adanya pengurus kampung, maka basis pembangunan tidak lagi berdasarkan RT-RW. Pembangunan didasarkan pada basis kampung, dimana kampung-kampung yang dibentuk terdiri atas beberapa RW. Banyaknya fungsi yang diemban oleh pengurus kampung, maka memunculkan berbagai permasalahan antara lain:

a. Pengurus kampung belum memiliki sistem pencatatan secara terkomputerisasi untuk pengelolaan struktur kepengurusan kampung, kepengurusan RW, dan kepengurusan RT setiap periodenya.

b. Pengurus kampung belum memiliki sistem pencatatan secara terkomputerisasi untuk pengolahan potensi wilayah berupa fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap RT-RW.
c. Pengurus kampung, pengurus RW, dan pengurus RT kesulitan dalam pendataan dan pengendalian penduduk permanen-nonpermanen, dari aspek administrasi maupun sosial.

Permasalahan-permasalahan di atas saling terkait dan perlu diintegrasikan sehingga semua pemangku kepentingan mulai dari RT, RW, dan pengurus kampung memiliki alat untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan abdimas dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan sekali dalam seminggu.

a. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan abdimas dilakukan melalui empat tahap/alur mekanisme. Tahap pertama adalah persiapan yang menghasilkan materi dan proposal. Tahap kedua adalah pelaksanaan yang menghasilkan dokumentasi. Tahap ketiga adalah evaluasi yang menghasilkan rekomendasi. Tahap keempat adalah penyusunan laporan dan luaran yang menghasilkan laporan kemajuan, laporan akhir, bahan ajar, poster dan jurnal. Alur pelaksanaan abdimas dapat dilihat pada Gambar 1 (Zaidir & Listiawan, 2022).

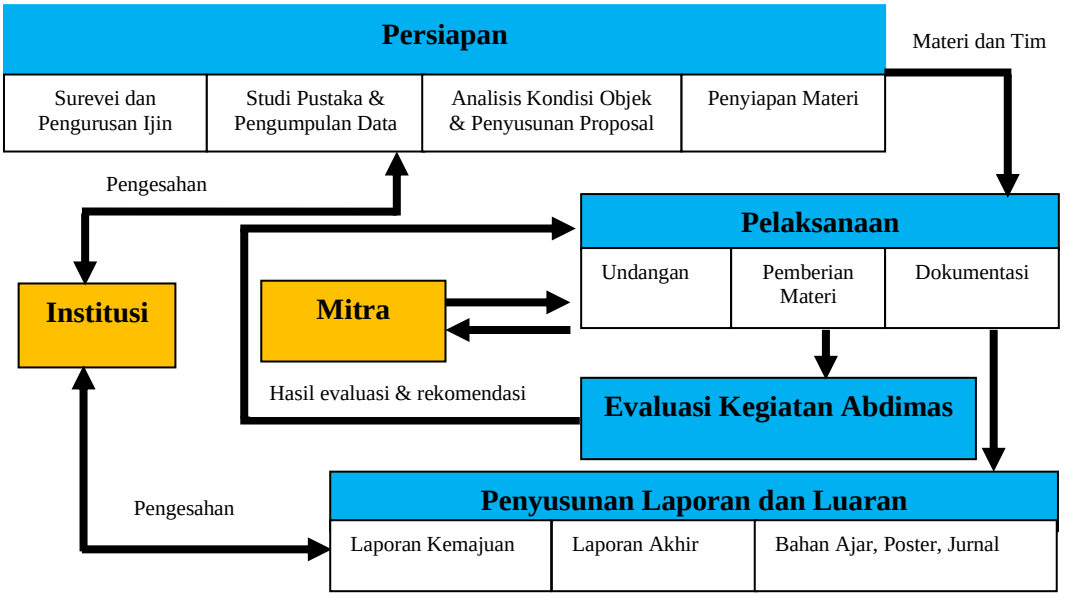

Gambar 1 Mekanisme Pengabdian Kepada Masyarakat (Zaidir & Listiawan, 2022)

Dalam pelaksanaan, peserta diundang oleh tim bekerjasama dengan pengurus kampung Kepuh-Balapan sebagai mitra. Ketua tim abdimas memberikan pemaparan umum kepada peserta mengenai aplikasi berdasarkan modul yang telah dibagikan sebelumnya. Kebutuhan lainnya seperti laptop, wifi, dll disediakan oleh tim abdimas. Peserta yang sudah diberi pencerahan selanjutnya diberi kesempatan untuk menjalankan aplikasi dengan didampingi oleh anggota tim abdimas.

b. Personil Pelaksanaan Kegiatan

Guna mendukung keberhasilan program pengabdian pada masyarakat (abdimas) kolaborasi ini melibatkan personil dari dua fakultas yaitu FISE (Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi) dan FST (Fakultas Sains dan Teknologi) Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO). Keterlibatan tim dari FISE sangat diperlukan karena pada tempat kegiatan

pengabdian kepada masyarakat membutuhkan pendekatan kultural dan komunikasi dalam bahasa internasional karena banyak penduduk nonpermanen yang berasal dari negara lain. Susunan personil pengabdian pada masyarakat yang diusulkan ini terdiri atas Ketua Pelaksana 1 orang dan anggota pelaksana 3 orang dengan uraian:

1) Ketua pengabdi : Zaidir, ST., M.Cs (Dosen FST)
2) Anggota pengabdi 1 : Erizal, S.Si., M.Kom (Dosen FST)
3) Bagus Subekti Nuswantoro, S.IP, M.A (Dosen FISE)
4) Hermansyah Nugroho Nurokhim (Mahasiswa FST)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian sudah dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari proses sosialisasi sampai proses pendampingan.

a. Sosialisasi Masalah Kependudukan dan Sosial

Sosialisasi dilakukan kepada semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah kampung Kepuh-Balapan yang terdiri atas pengurus kampung, pengurus RW di wilayah kampung Kepuh-Balapan, pengurus RT di wilayah kampung Kepuh-Balapan. Kegiatan sosialisasi dan demo aplikasi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 yang dihadiri oleh perwakilan RT ataupun RW kampung Kepuh-Balapan kelurahan Klitren seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi dan Demo Aplikasi

b. Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem

Kegiatan pendampingan implementasi sistem informasi penduduk permanen dan nonpermanen untuk pengurus RT dilakukan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 di rumah salah satu pengurus RW Kepuh Balapan seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Pendampingan Bagi Pengurus RT

Pada saat pendampingan untuk pengurus RT, peserta yang hadir cukup banyak dan menyambut gembira, namun keterbatasan pengetahuan terhadap IT sehingga masih banyak pengurus yang merasa gugup dalam menggunakan aplikasi. Fitur-fitur aplikasi dapat digunakan dan dipahami keterkaitan fitur satu dengan fitur lainnya. Proses pengolahan data dapat dilakukan melalui dashboard yang menyediakan menu-menu. Gambar 4 memperlihatkan dua dashbar dan dua pengolahan data.

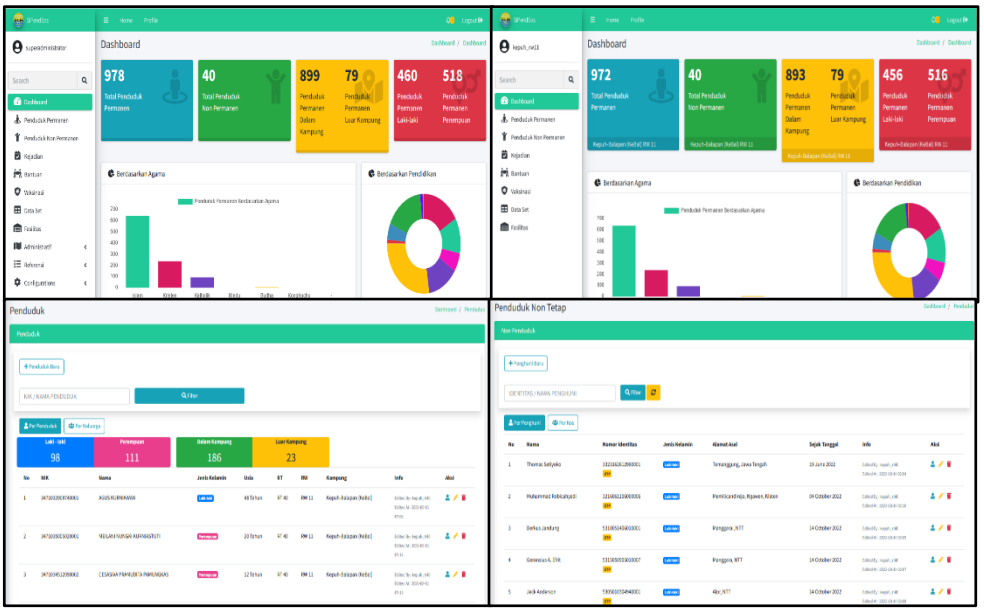

Gambar 4 Dashboard dan Pengolahan Data

Sistem informasi yang disajikan pada kegiatan abdimas ini merupakan pengalaman baru sebagian besar peserta. Banyak peserta yang mempertanyakan fungsi, manfaat dan urgensi dari sistem informasi yang disampaikan pada kegiatan abdimas. Berdasarkan tanya jawab dalam suasana yang akrab, tim abdimas dapat meyakinkan peserta bahwa sistem informasi manajemen pengelolaan penduduk berfungsi untuk memudahkan Ketua RT dan Ketua RW dalam mendata penduduknya berdasarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta memperkecil kemungkinan untuk duplikasi data pada pendataan penduduk (Layali, Andrawina, & Anggana, 2021).

Setelah pelaksanaan pendampingan untuk pengurus RT, tim melakukan evaluasi pelaksanaan terutama terkait dengan efektivitas pendampingan dan kemampuan penyerapan peserta terhadap materi yang disampaikan. Kendala ketersediaan laptop dalam pendampingan diatasi dengan cara memodifikasi aplikasi agar bisa dipakai menggunakan handphone. Tim abdimas membutuhkan waktu 2 minggu untuk memodifikasi aplikasi agar sesuai dengan tujuan hasil evaluasi.

Pendampingan lanjutan dilakukan untuk pengurus RW dan pengurus RT serta perwakilan RT tiap RW agar memiliki pandangan dan kesepakatan dalam penggunakan aplikasi. Bukti pelaksanaan disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Pendampingan Bagi Pengurus Kampung dan Pengurus RW

Kegiatan ini selain dihadiri oleh ketua kampung Kepuh-Balapan, juga dihadiri oleh Lurah kelurahan Klitren yang ikut memberikan dukungan pada kegiatan pendampingan pengelolaan data penduduk bagi pengurus kampung dan pengurus RW seperti terlihat pada Gambar 6.
Mitra abdimas yang diwakili oleh ketua kampung Kepuh-Balapan bapak Dr. Ir. Wahyu Supartono menyambut baik sinergitas yang terjalin antara kampus Universitas Respati Yogyakarta dengan kampung Kepuh-Balapan kelurahan Klitren Yogyakarta. Ketua kampung sangat puas dengan aplikasi yang dihasilkan karena dapat melakukan monitoring secara langsung berbagai hal terkait penduduk permanen dan nonpermanen yang ada di kampung Kepuh-Balapan. Hasil monitoring akan dikaji dan ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

Gambar 6. Pendampingan Bagi Pengurus Kampung dan Pengurus RW

Lurah Klitren Bapak Akhmad Zainuri, S.Sos memberikan apresiasi dengan inovasi yang dilakukan oleh tim Dosen Universitas Respati Yogakarta. Ruang lingkup aplikasi bisa ditingkatkan tidak hanya satu kampung Kepuh-Balapan namun juga bisa menjangkau tiga kampung yang ada di kelurahan Klitren. Pengurus RT, pengurus RW, dan pengurus Kampung diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai nilai tambah wilayah khususnya pemanfaatan teknologi informasi yang akan memberikan perbaikan terhadap tata kelola wilayah masing-masing. Aplikasi ini diharapkan menjadi pelengkap terhadap aplikasi yang sudah dibuat oleh pemkot terkait dengan masalah kependudukan. Bagi tim dosen diucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dan karya inovasinya untuk kampung Kepuh-Balapan khususnya dan kelurahan Klitren pada umumnya. Semoga sinergitas ini dapat berkelanjutan dengan inovasi-inovasi kekinian yang membawa kebaikan pada lembaga kampus dan lembaga-lembaga masyarakat.

5. KESIMPULAN

Kegiatan abdimas melalui sosialisasi dan pendampingan implementasi aplikasi kependudukan dapat menambah pengetahuan para pengurus kampung, pengurus RW, dan pengurus RT. Sistem informasi yang dihasilkan lebih memudahkan pengurus kampung, pengurus RW sampai pengurus RT dalam pendataan dan pengendalian penduduk permanen-nonpermanen, baik dari aspek administrasi maupun aspek sosial sehingga ketersediaan informasi lebih memadai.

Aplikasi atau sistem yang dihasilkan sebaiknya digunakan oleh pemangku kepentingan mulai dari pengurus RT, pengurus RW, dan pengurus kampung untuk meningkatkan identifikasi dan pengendalian terkait penduduk permanen-nonpermanen. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur lainnya sehingga akan lebih berdayaguna dalam pengelolaan data di basis kampung. Kegiatan pendampingan implementasi aplikasi kependudukan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kepuh-Balapan dimasa yang akan datang agar pengurus RT dan pengurus RW semakin familiar dengan sistem dan data yang diolah semakin lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana hibah internal tahun anggaran 2022 mengucapkan terima kasih pada PPPM Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO), pemangku kepentingan di kampung Kepuh-Balapan, seluruh ketua RW dan ketua RT di wilayah kampung Kepuh Balapan yang telah bersinergi, berinteraksi dengan penuh semangat dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan/pelatihan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, B. (2021). Pengembangan Model Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Website pada Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer (JuPerSaTeK)*, 19-28.

Aziz, M. F., & Fajarita, L. (2018). Permodelan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kelurahan Pondok Pucung Berbasis Object Oriented. *Jurnal IDEALIS , 1*(4), 328-333.

Choirunnisa, V. A., Nugraha, G. S., & Qoroni, W. (2022). Perancangan Sistem Informasi Kependudukan Kelurahan Pejeruk. *JBegaTI, 3*(1), 56-68.

Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Surakata. *Jurnal Inovasi Penelitian , 2*(5), 1413-1432.

Gunawan, A., & Martua, J. (2021). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Upaya Penataan Kependudukan di Kantor Camat Kecamatan Tanjungbalai Selatan. *Jurnal Tectum*, 37-52.

Henny. (2020). Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Desa (SIMKADES) Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, 45-51.

Layali, I., Andrawina, L., & Anggana, H. D. (2021). Perancangan Sistem Informasi Manajemen untuk Pengelolaan Data Penduduk Dalam Tingkat RW Dengan Metode Waterfall di RW 03 Kelurahan Uwung Jaya. *e-Proceeding of Engineering*, 8143-8154.

Musa, A. B., Seto, S. B., Sa'o, S., & Naja, F. Y. (2022). Perancangan Sistem Informasi Data Kependudukan Berbasis Web Pada Kelurahan Lokoboko Kecamatan Ndona. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 34-40.

Redfada, G. D., & Nurharjadmo, W. (2021). Evaluasi Implementasi Program Sistem Informasi Terpadu Penduduk Nonpermanen (SINTEN) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 234-252.

Sudibya, I. M., Pradnya, I. M., Suardika, I. G., & Kusuma, I. G. (2019). Sistem Informasi Pendataan Penduduk Pendatang Kecamatan Tegallalang. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, 8*(2), 175-185.

Zaidir. (2022). *Pemodelan Sistem Informasi Pendataan dan Pengendalian Penduduk Permaen-Nonpermanen Berbasis Kampung. Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, Informatika dan Sistem Informasi (SINTaKS)*, 1-7.

Zaidir, & Listiawan, I. (2022). *Sosialisasi dan Pelatihan Teknologi Informasi Bagi UMKM di*

Kelurahan Klitren untuk Bertahan dan Berkembang di Era Pandemi Covid-19. urnal Pengabdian " Dharma Bakti ", 19-26.